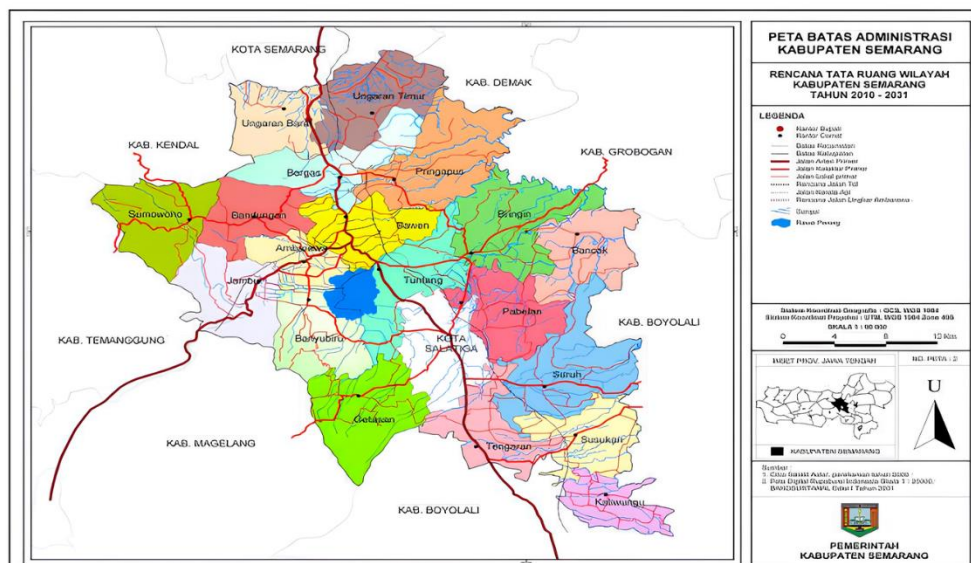


BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 1100 14' 54,75" – 1100 39' 3" Bujur Timur dan 70 3' 57" Lintang Utara - 7 0 30' 0" Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 1.019,27 km², dalam hitungan persentase sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang

Sumber: RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2023

Letak geografis Kabupaten Semarang secara langsung berbatasan dengan 8 kabupaten/Kota. Adapun batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara : Kota Semarang.
2. Sebelah timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali.
3. Sebelah selatan : Kabupaten Boyolali.
4. Sebelah barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Kabupaten Semarang memiliki luas 1.019,27 km², dalam hitungan persentase sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 84,27 km² (8,27%), diikuti Kecamatan Getasan (6,92%) dan Kecamatan Suruh (6,47%) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa yang seluas 29,79 km² (2,92 %) dan Kaliwungu (3,15%). Lokasi Kabupaten Semarang berdasar ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada ketinggian 318 mdpl hingga 1450 mdpl. Dalam artian, wilayahnya sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 mdpl. Lokasi yang relatif tinggi menjadikan sebagian besar wilayah di Kabupaten Semarang memiliki hawa yang sejuk.

Adapun visi dari Kabupaten Semarang yaitu “Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera, dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, Berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika''. Sedangkan Misi dari Kabupaten Semarang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa sektor lain yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang. Dengan luas wilayah sekitar 54,51 km², Kecamatan Banyubiru mencakup 10 desa yang tersebar, serta terdiri dari 89 dusun, 314 RT, dan 105 RW. Pembagian administratif ini menunjukkan betapa luas dan beragamnya kawasan yang menjadi bagian dari Kecamatan Banyubiru. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Camat dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang berfungsi mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta melayani kebutuhan masyarakat. Di Kecamatan Banyubiru, terdapat 10 Kepala Desa yang memimpin masing-masing desa, 10 Kepala Dusun yang bertugas di tingkat dusun, 20 Kepala Seksi (Kasi) yang mengelola bidang tertentu, 30 Kepala Urusan (Kaur) yang mengatur urusan administrasi dan keuangan, serta 10 staf teknis. Dari sisi topografinya, desa di Kecamatan Banyubiru mayoritas berupa lereng/puncak dan dataran dengan rata-rata ketinggian 611 meter. Kemudian dari segi iklim dan cuaca, pada bulan Januari 2022, jumlah curah hujan di Kecamatan Banyubiru sebesar 277 mm dengan hari hujan sebanyak 20 hari.

Wilayah Kecamatan Banyubiru memiliki jarak 22 kilometer dari ibukota Kabupaten Semarang. Batas wilayah Kecamatan Banyubiru yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Jambu, dan Kabupaten Magelang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Timur

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kabupaten Magelang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jambu.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Banyubiru, 2022

No	Desa/ Kelurahan	Luas Total Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Wirogomo	4,95	9,10%
2.	Kemambang	3,94	7,24%
3.	Sepakung	9,55	17,55
4.	Kebumen	3,96	7,28%
5.	Gedong	4,15	7,63%
6.	Rowoboni	5,23	9,61%
7.	Tegaron	5,93	10,90%
8.	Kebondowo	6,93	12,74%
9.	Banyubiru	6,74	12,39%
10.	Ngrapah	3,03	5,57%

Sumber: Kecamatan Banyubiru Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa desa/kelurahan dengan wilayah terluas di Kecamatan Banyubiru adalah Desa Sepakung, yang mencakup 17,55% dari total luas kecamatan. Sebaliknya, Desa Ngrapah merupakan desa/kelurahan dengan wilayah terkecil, hanya sebesar 5,57% dari total luas Kecamatan Banyubiru.

Kecamatan Banyubiru adalah salah satu kecamatan terletak di Kabupaten Semarang yang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Banyubiru ini mencapai 45.429 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk dari masing-masing desa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyubiru

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Wirogomo	1629	1553	3182
Kemambang	957	968	1925
Sepakung	2310	2189	4499
Kebumen	2986	3000	5986
Gedong	1204	1260	2464
Rowoboni	1315	1370	2685
Tegaron	2824	2768	5592
Kebondowo	3565	3500	7065
Banyubiru	3900	3852	7752
Ngrapah	2158	2121	4279
Jumlah/Total	22848	22581	45429

Sumber: Kecamatan Banyubiru Dalam Angka 2023

Berdasarkan informasi dari tabel tersebut, total jumlah penduduk di Kecamatan Banyubiru pada tahun 2023 mencapai 45.429 jiwa. Dari jumlah tersebut, 22.848 jiwa merupakan laki-laki, sementara 22.581 jiwa lainnya adalah perempuan. Desa Kebumen tercatat sebagai desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Banyubiru, yaitu sebanyak 1.497 jiwa. Secara keseluruhan, penduduk di kecamatan ini lebih didominasi oleh laki-laki. Rasio jenis kelamin di Banyubiru tercatat sebesar 101, yang berarti terdapat sekitar 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

2.3 Gambaran Umum Desa Wirogomo

Desa wirogomo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banyubiru. Secara administratif, Desa Wirogomo memiliki luas wilayah mencapai 4,95 km². Jumlah Penduduk Desa Wirogomo pada tahun 2022 mencapai 3182 jiwa, dengan rincian Perempuan berjumlah 1553 jiwa dan laki-laki berjumlah 1629 jiwa. Apabila dilihat dari kepadatan penduduk, rata-rata kepadatan penduduk di Desa Wirogomo sebesar 643 orang/km², persentase penduduk sebesar 7,00% dan rasio jenis kelamin sebesar 105.

Desa Wirogomo terdiri dari sebelas dusun, yaitu Dusun Jeruk Wangi, Pule, Keningar, Seseh, Wirogomo Tengah, Wirogomo Lor, Krajan Lor, Krajan Kidul, Kendal Ngisor, Kendal Nduwur, Tlumpak. Adapun batas Wilayah Desa Wirogomo sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Banyubiru
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Magelang
- 3) Sebelah Barat : Desa Jambu
- 4) Sebelah Timur : Desa Kemambang

Desa Wirogomo merupakan desa yang memiliki karakteristik unik sebagai wilayah yang terletak di dataran tinggi. Berdasarkan kondisi geografisnya, Desa Wirogomo memiliki iklim tropis dengan pola musim hujan dan kemarau yang bergantian sepanjang tahunnya sehingga menciptakan suhu yang cenderung sejuk. Sumber air Desa Wirogomo berasal dari lereng Gunung Telomoyo, dengan dua air mata yang menghasilkan debit berkecepatan sekitar 15 liter/detik. Mayoritas hasil pertanian Desa Wirogomo berupa padi dan aneka sayuran segar seperti kubis, tomat, singkong dan jagung. Sebagian besar hasil panen tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, dan sisa hasilnya dijual kepada tengkulak atau pedagang besar. Selain itu, hasil panen seperti jagung dan singkong juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi untuk mendukung sektor peternakan di Desa Wirogomo.

Desa Wirogomo dikenal sebagai kawasan yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Desa Wirogomo mempunyai komoditas unggulan yaitu meliputi padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran seperti kubis, wortel, labu, buncis, kapri, tomat, seledri, serta cabai. Sementara itu, terdapat pula komoditas lain yang bukan menjadi prioritas unggulan namun tetap dihasilkan sebagai hasil sampingan, seperti alpukat, pundung, nangka, kayu keras (sengon), pepaya, pisang, kelengkeng, singkong, talas/kimpul, kopi, tembakau, cengkeh, hingga jengkol dan petai.

2.4 Gambaran Organisasi yang menjadi Situs Penelitian

2.4.1 Gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parikesit, Desa Wirogomo

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo adalah bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Parikesit diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi desa, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi usaha yang ada di Desa Wirogomo. BUMDes Parikesit sudah berdiri sejak tahun 2015. Secara kelembagaan, BUMDes Parikesit telah memiliki struktur organisasi yang mencakup direktur, sekretaris, bendahara, serta beberapa divisi operasional. Struktur ini memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan usaha desa. Namun, hingga saat ini, belum ada dokumen visi dan misi yang disusun untuk menjadi pedoman arah pengelolaan. Ketiadaan visi dan misi menyebabkan pengelolaan BUMDes berjalan tanpa arah strategis yang jelas, sehingga potensi yang besar belum sepenuhnya dapat dimaksimalkan. Selain itu, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pengurus juga belum didefinisikan secara rinci, sehingga menimbulkan tumpang tindih pekerjaan atau bahkan kekosongan peran dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Meski demikian, BUMDes ini tetap beroperasi dan berupaya menjalankan unit-unit usaha yang relevan dengan potensi lokal, seperti pengelolaan hasil pertanian dan peluang

lain yang ada di desa. Dukungan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes cukup baik, meskipun perlu penguatan dalam hal sosialisasi peran dan manfaat BUMDes bagi warga desa.

2.4.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parikesit, Desa Wirogomo

Setiap organisasi tentu memerlukan struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Struktur organisasi dapat dipahami sebagai rangkaian elemen yang mengatur pembagian posisi anggota, yang menunjukkan pembagian tugas serta memastikan koordinasi antarbagian berjalan lancar. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Parikesit Desa Wirogomo, Badan Usaha Milik Desa Parikesit tersebut memiliki struktur organisasi yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Parikesit" Desa Wirogomo Masa Bakti 2019-2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Keterangan
1.	Suwignyo	Penasehat	Kepala Desa
2.	Salim S.Pd	Ketua Pengawas	
3.	Hananto	Wakil Ketua Pengawas	
4.	Marmi	Anggota Pengawas	
5.	Murmiyati	Anggota Pengawas	
6.	Maryadi	Anggota Pengawas	
7.	Sodikin	Direktur	

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Keterangan
8.	Putri Kurniyati	Sekretaris	
9.	Sri Wahyuningsih	Bendahara	
10.	Sulastri	Anggota	
11.	Saputri Muflikhati	Anggota	
12.	Alip Wahyudi	Anggota	
13.	Muyati	Anggota	

Sumber: Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor 9 Tahun 2019

2.4.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

2.4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, yaitu :

Visi :

Visi DISPERMADES Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah “Mewujudkan Keswadayaan Dan Kemandirian Masyarakat ”

Misi :

Untuk mewujudkan visi DISPERMADES Kabupaten Semarang maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keswadayaan masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan penerapan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Meningkatkan peran lembaga organisasi masyarakat pedesaan.

2.4.2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran vital dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa di wilayah Kabupaten Semarang. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Semarang, Dinas ini bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki posisi penting dan bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Kepala Dinas tersebut bekerja sama dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang memiliki tanggung jawab utama untuk merancang dan melaksanakan kebijakan daerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sebagai institusi yang bertugas dalam bidang ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang memainkan peran penting dalam mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas ini memiliki sejumlah peran penting, antara lain:

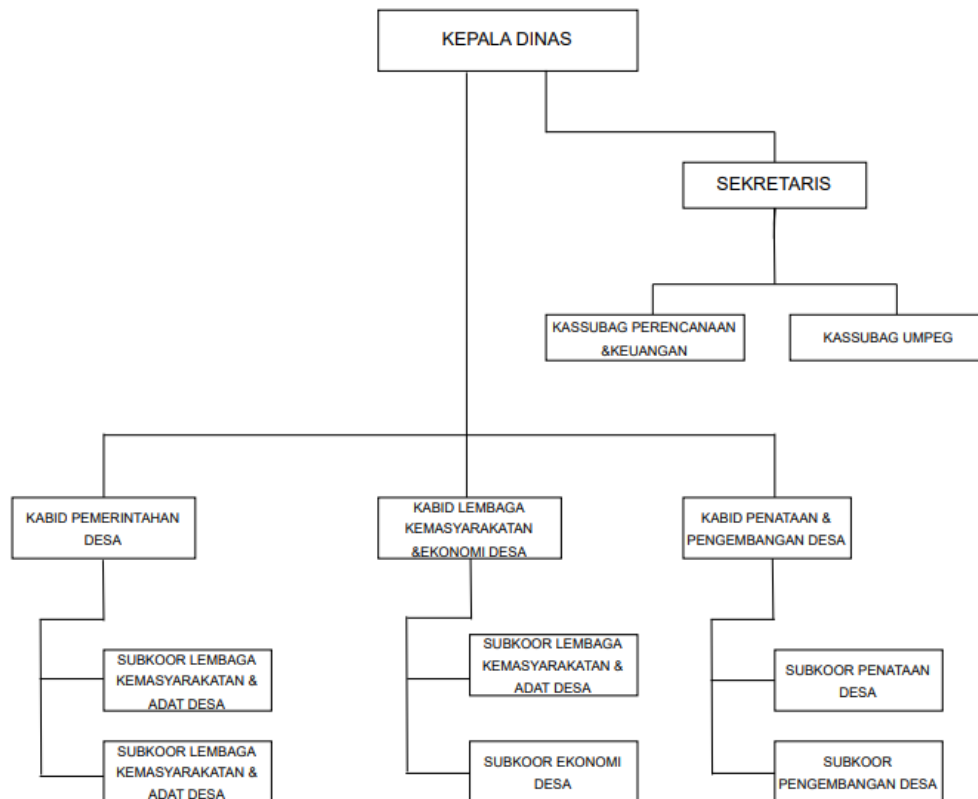
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksana Kegiatan bidang pemberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan desa dan teknologi tepat guna;
- d. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh bupati.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang memiliki sejumlah fungsi yang berhubungan erat dengan pengelolaan BUMDes. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan dukungan, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pembangunan desa, dan penerapan teknologi tepat . Melalui Kasi. Ekonomi Desa, dinas ini berperan aktif dalam mendorong

pembentukan serta pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama. Kasi. Ekonomi Desa menjalankan berbagai upaya strategis seperti memberikan sosialisasi, mengadakan pelatihan bagi pengurus BUMDes, serta melakukan pemantauan melalui pendampingan langsung di lapangan. Selain itu, dinas ini turut memantau perkembangan BUMDes Bersama dengan dukungan aplikasi digital yang terintegrasi dengan Kementerian Desa, sehingga memungkinkan pelaporan dan evaluasi yang lebih efisien.

2.4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

Merujuk pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, serta Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dapat digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Semarang Tahun 2023

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Tahun
2023

Bagan di atas menunjukkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Kepala, yang membawahi:

- 1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Ka.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Ka.Subbagian Umum dan kepegawaian;
- 2) Kepala Bidang Pemerintah Desa , membawahi:
 - a. Sub Koordinator Kelembagaan Pemerintah Desa

- b. Sub Koordinator Keuangan dan Kekayaan Desa
- 3) Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa
 - a. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa
 - b. Sub Koordinator Ekonomi Desa
- 4) Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa
 - a. Sub Koordinator Penataan Desa
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Desa

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang memegang peranan strategis sebagai fasilitator dan pembina dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dispermades bertanggung jawab memastikan bahwa pembinaan terhadap pengelola BUMDes berjalan secara efektif dan selaras dengan visi pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas ini, Sub Koordinator Ekonomi Desa berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Dispermades dan implementasinya di lapangan. Melalui pendampingan teknis, pelatihan berbasis kebutuhan, dan penyuluhan yang berkesinambungan, Sub Koordinator Ekonomi Desa membantu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsi mereka secara profesional. Selain itu, mereka juga aktif mendorong kolaborasi sinergis antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat posisi BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa. Dengan dukungan strategis dan operasional yang terintegrasi, Sub Koordinator Ekonomi Desa bersama Dispermades diharapkan mampu menciptakan tata kelola BUMDes yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga

memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang.